



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT  
KOMISI V DPR RI**

**(BIDANG PERHUBUNGAN, PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT,  
PEMBANGUNAN PEDESAAN DAN KAWASAN TERTINGGAL, BADAN METEOROLOGI,  
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA, BADAN SAR NASIONAL, BPLS, DAN BPWS)**

---

Tahun Sidang : 2011 – 2012  
Masa Sidang : II  
Rapat : Ke - 3 (tiga)  
Jenis Rapat : Rapat Kerja  
Hari/Tanggal : Selasa, 29 November 2011  
Sifat : Terbuka  
Pukul : 09.45 WIB s.d 13.00 WIB  
Tempat : Ruang Rapat Komisi V (Ruang KK V)  
Acara : - Pembahasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Semester I Tahun 2011; dan  
- Evaluasi Pelaksanaan APBN 2011.  
Ketua Rapat : Nusyirwan Soejono, ST  
Sekretaris : Dra. Hani Yuliasih  
Hadir Anggota : dari 54 orang Anggota Komisi V DPR RI  
Hadir Mitra : Menteri Perumahan Rakyat beserta jajaran terkait lainnya.

**KESIMPULAN/KEPUTUSAN RAPAT**

**I. PENDAHULUAN**

1. Ketua Rapat membuka rapat pada pukul 09.45 WIB setelah kuorum terpenuhi, dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Ketua Rapat menyampaikan agenda Rapat Kerja Komisi V DPR RI dengan Menteri Perumahan Rakyat pada hari ini adalah untuk membahas tindak lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Semester I Tahun 2011 dan evaluasi pelaksanaan APBN 2011.
3. Ketua Rapat mempersilakan kepada Menteri Perumahan Rakyat untuk menyampaikan paparan dan penjelasannya.
4. Ketua mempersilakan kepada anggota Komisi V DPR RI untuk menyampaikan tanggapan dan pertanyaan.

## II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN RAPAT

1. Komisi V DPR RI meminta Kementerian Perumahan Rakyat untuk segera menyelesaikan tindak lanjut semua rekomendasi atas 7 temuan Hasil Pemeriksaan BPK Semester I Tahun 2011 untuk mewujudkan pengelolaan keuangan Pemerintah yang transparan dan akuntabel.
2. Komisi V DPR RI menyampaikan apresiasi atas capaian serapan Kementerian Perumahan Rakyat TA 2011 yang hingga 28 November 2011 untuk BA-999 sebesar 98,33%, namun demikian Komisi V DPR RI prihatin terkait capaian realisasi anggaran khususnya untuk BA 091 tercatat baru sebesar 25,65% keuangan dan fisik 61,74%. Selanjutnya Komisi V DPR RI mendesak Kementerian Perumahan Rakyat untuk meningkatkan capaian serapan BA-091 baik realisasi fisik maupun keuangan, dengan segera menyelesaikan berbagai penyebab rendahnya serapan anggaran.
3. Komisi V DPR RI menyesalkan tidak terserapnya anggaran Kementerian Perumahan Rakyat TA 2011 terkait :
  - a. program pro rakyat klaster IV (rumah sangat murah), sebesar Rp244,63 Miliar dari Rp 394,63 Miliar;
  - b. penanganan rumah MBR di Provinsi NTT sebesar Rp 200 Miliar dari Rp 300 Miliar;
  - c. Rusunawa sebesar Rp 285,28 Miliar dari Rp. 1,075 Triliun.
 Selanjutnya Komisi V DPR RI meminta Kementerian Perumahan Rakyat melakukan evaluasi terkait penyebab permasalahan tersebut agar tidak terulang pada Tahun Anggaran berikutnya.
4. Komisi V DPR RI akan mengagendakan Rapat Kerja dengan Kementerian Keuangan, Bappenas, dan Kementerian Mitra Kerja Komisi V DPR RI terkait pemblokiran anggaran.

## III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 13.00 WIB.

Jakarta, 29 November 2011

**MENTERI PERUMAHAN RAKYAT,**

ttd

**DJAN FARIDZ**

**KETUA RAPAT,**

ttd

**NUSYIRWAN SOEJONO**

**Catatan :**

**Diharapkan serapan mencapai 71%**